

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat desa yang dinamis didukung semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan, informasi teknologi komunikasi dan keterampilan menuntut profesionalitas dari aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan kapasitas, dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Aparatur desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik.

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Pemerintah Modren saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah seperti yang di kemukan oleh Rasyid., (1997:11) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistim ketertiban dimana masyarakat bisa di layani secara wajar. Sebagai abdi Negara, aparatur desa dengan fungsi gandanya diharapkan mampu mewakili masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemerintah Desa dibawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, (2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam meningkatkan kinerja Aparatur Desa tentang Sistim Informasi Desa (SID) yang dapat digunakan oleh perangkat desa untuk mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan

dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Presiden R.I. Joko.Widodo., (2018) di Lubuk Pakam Sumatera Utara, mengatakan kedepan peruntukan dana desa akan diprioritaskan untuk pembangunan pelatihan sumber daya manusia, termasuk peningkatan keahlian masyarakat desa, dengan demikian masyarakat di desa mampu mengelola sumber daya alam yang ada didesanya, pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa Katanya di Lubuk Pakam, Dalam Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan Masyarakat Desa Tahun 2018.

Bapak Presiden R.I. mengemukakan bahwa semula dana desa banyak yang tidak terserap karena masih banyak aparatur desa yang belum memahami peruntukannya. Namun penyerapan dana desa kemudian sering tidak tepat sasaran karena lemahnya pemahaman aparatur desa dan kualitas pendamping desa serta belum terwujudnya program-program pelatihan bagi mereka. Diharapkan Serapan dana terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Artinya Pembangunan desa tidak boleh setengah-tengah, harus betul-betul dana desa tepat sasaran.

Kelemahan Aparatur Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat saat ini terjadi ketidak sempurnaan administrasi dipandang sebagai situasi yang suram, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi., (2018) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat ini lebih baik zaman atok saya dari pada sekarang, karena Administrasi desa kurang baik di bandingkan dari zaman atokku dulu, Kompas Desa Langkat, (2018) jika seandainya kondisi administrasi pemerintahan desa telah terjadi hal ini mengindikasikan bahwa

bagaimana kondisi Negara ini tidak merebak keseluruh pelosok negeri, baik pada tingkat nasional bahkan sampai ketingkat desa.

Pengembangan SID dapat memberikan inovasi baru bagi kantor pemerintahan desa untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat desa ditinjau dari segi kualitas pelayanan terhadap masyarakat, produktivitas, responsibilitas, untuk meningkatkan kinerja aparatur desa yang dilaksanakan melalui pelatihan, didalam P.P. R.I. Nomor 71 tahun 1991 pasal 1 disebutkan “ Latihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori”.

Banyak penelitian yang telah dilakukan membuktikan, bahwa keberadaan teknologi informasi berperan penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia sebuah organisasi. Pengembangan dengan pengintegrasian teknologi informasi dalam pelatihan peningkatan sumber daya manusia semakin di butuhkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengembangan multi media sebagai sarana penyampaian pesan pembelajaran yang dilakukan.

Model dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir. Sebuah model biasanya menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Pribadi., (2010:86).mengatakan dengan kata lain model juga dapat dipandang sebagai upaya dan untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut Miarso., (2011:2). Model adalah representasi suatu proses dalam bentuk grafis dan/atau naratif, dengan menunjukkan unsur-unsur utama

serta strukturnya. Dalam hal ini dimungkinkan penafsiran model naratif ke dalam bentuk grafis, atau sebaliknya.

Susatya., E (2013). Mengatakan bahwa pengembangan model pelatihan Kapasitas Aparatur Desa adalah suatu komponen yang memiliki keterkaitan dengan komponen lain, sehingga semakin sempurna setiap proses dilakukan semakin baik hasil yang diperoleh.

Terkait sistem pelatihan terintegrasi dari model-model dijelaskan di atas, serta membahas topik penelitian ini, merupakan pengembangan yang mengadaptasi sebagian model Mayo & Dubois, (ADDPC) Analyz, Design, Development, Planning, Counduct.

Dalam melakukan kolaborasi tersebut beberapa tahapan berkaitan tentang kesesuaian jenis dan tujuan penelitian seperti pelatihan model Mayo & Dubois merupakan Model pelatihan dikembangkan menyesuaikan setiap langkah yang dilakukan dengan evaluasi untuk umpan balik sementara dalam langkah-langkahnya ADDCIE disesuaikan menjadikan lebih efektif, simpel dan sederhana yaitu model (ADDCIE) Analysis, Desain, Development, Couduct, Implementation, Evaluation. Dengan uraian sebagai berikut :

- I. Model Goad 5 tahap yaitu: (Analyze, Design, Develop, Conduct, Evaluate) (ADPPE) : 1. Analysis, 2. Desain Pendekatan Pelatihan ,3. Pengembangan Materi pelatihan, 4. Pelaksanaan Pelatihan, 5. Evalausi dan Pemuktahiran pelatihan
- II. Model Partisipatif 10 tahap yaitu : (Retaaulpee) : 1. Rekuitmen peserta pelatihan, 2. Identifikasi kebutuhan Sumber dan hambatan, 3.Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, 4. Alat evaluasi awal peserta, 5.Alat evaluasi akhir

peserta, 6. Urutan kegiatan bahan belajar, metode dan teknik, 7. Latihan pelatih, 8. Pelaksanaan proses pelatihan, 9. Evaluasi akhir peserta, 10. Evaluasi program pelatihan

III. Model Pelatihan Mayo & Dubois 5 Tahap yaitu :(ADDPC) : 1. Fase Analysis operasional , rekrutmen, 2. Fase Defining training rekrutmen, 3. Fase Developing objective, 4. Fase planning, developing and validating dan 5. Fase conduct and evakuate the training .

Yang dikembangkan Kombinasi dari tiga model tersebut untuk lebih sederhana dan efektif yaitu : ADDCIE : 1. Analisis : Kebutuhan pelatihan, 2. Design : Merancang Diklat Pembelajaran, 3. Development : Membangun pelaksanaan diklat dan organisasi, 4. Conduct: 5. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kemampuan : SK Tim Kerja Panitia, Dana dan sarana pendukung Implementation : Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan materi dan praktek dan kaitannya ditempat kerja atau tindak lanjut, 6. Evaluation : evaluasi pelatihan dan evaluasi program pelaksanaan pelatihan terhadap peserta dan pelaksanaan dan sekaligus hasil belajar pre tes dan postes. Dengan sintaks sebagai berikut:

Sintak Model Pembelajaran ADDCIE

Tahap	Peran Fasilitator
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan Aparatur Desa	Fasilitator menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar
Mendemonstrasikan keterampilan (pengetahuan procedural) atau mempresentasikan pengetahuan (deklaratif)	Fasilitator mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, atau menyajikan informasi tahap demi tahap
Membimbing pelatihan	Fasilitator merencanakan dan member bimbingan pelatihan
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik	Fasilitator mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik, memberi umpan balik
Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan	Fasilitator mempersiapkan kesempatan untuk melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari

Untuk menyempurnakan tentang keberadaan model memerlukan langkah awal menyelesaikan permasalahan serta memfokuskan kerja tim sepenuhnya. Model pelatihan pada awalnya berkembang pada tim kerja yang bentuk berdasarkan Sk Kepala Desa dan diikuti fasilitator atau pendamping kegiatan belajar membelajarkan dilakukan Oleh seseorang warga belajar dan sumber belajar (tutor/fasilitator), maka perkembangan selanjutnya interaksi edukatif yang terjadi tidak hanya melalui perorangan tetapi melalui kelompok warga belajar.

Sasaran didik, sasaran pelatihan, yang memiliki kebutuhan tujuan belajar sama seorang, dua orang, atau lebih pelatih (sumber belajar, melatih) Perkembangan pelatihan di pertimbangkan efektif manakala dilandasi kurikulum evaluasi dan strategi sesuai dengan kebutuhan belajar sasaran didik masalah yang terjadi di tengah-tengahnya. Untuk itu diperlukan persyaratan khusus dalam membangun sebuah model pelatihan yang efektif dan efisien.

Agus Setiyo Budi Nugroho., (2013) Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis TIK sebagai salah satu alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat merupakan bagian dari implementasi e-Government sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Inpres Nomor 6 tahun 2001 tentang telematika dalam pemerintahan dan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul ketika pengelolaan data desa seperti proses administrasi data desa, pengelolaan data surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan beberapa ahli tentang pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa maka dapat digambarkan sebagai berikut: dalam mengembangkan peningkatan kapasitas aparatur Desa meliputi Perbaikan atau peningkatan program pelatihan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator.

Journal Educational Technology And The Future Challenge Teknologi dan tantangan masa depan Dr. Benny A. Pribadi., MA @gmail.com. Disampaikan dalam seminar Peluang dan Tantangan Teknologi Pendidikan dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean Universitas Tanjung Pura Pontianak, 28 Mei 2016. “ Teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran.

Penerapan bidang Teknologi Pendidikan dilakukan melalui upaya yang sistmatis dan sistemik dalam mendesain, mengembangkan, menerapkan, mengelola dan mengevaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Implementasi bidang teknologi pendidikan sangat relevan untuk upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan model pembelajaran.

Journal Advancing open and Distance Learning Research and Practices “ Develop a model of hybrid learning system applied in a training of research on instructional materials (Trini Prastati, Benny A. Pribadi, Sandra Sukmaning aji) in Univesitas Terbuka” The aim of this study is to develop a model of hybrid learning applied in a training of research on instructional materials in Universitas Terbuka (UT). A research and development (R &D) method was used to develop the hybrid learning model. The R and D method consists of several systematic and holistic step such as: (1) conducting need analysis, (2) establishing instructional goal;(3) Implementing instructional analysis;(4) analyzing trainees and setting;(5) establishing instructional objective;(6) developingmens assessment

instrument:(7) developing ve syllabus and instructional strategy; (8) developing learning materials; (9) conducting a formative evaluation.

Jurnal : Sistim Teknologi dan Informasi : Vol 3 No 2 Tahun 2013 (Positif

Jurnal-Sistim Teknologi dan Informasi)

“ Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik “ Politeknik Negeri Banjarmasin Agus Setiyo Budi Nugroho. “ Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis TIK sebagai salah satu alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat merupakan bagian dari implementasi e-Goverment sebagaimana yang tertuang dalam Amanat Inpres Nomor 6 tahun 2001 tentang telematika dalam pemerintahan dan Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronik di Indonesia. SID digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kerap muncul ketika pengelolaan data desa seperti proses administrasi data desa, pengelolaan data surat menyurat, serta pengelolaan data penduduk desa.

”diperkuat oleh *Journal : Practices In Instuctional In Instrctional System Design For Effective Open And Distance Learning Materials : Benny A Pribadi, DGS Doluwera, Yu Minsheng : The aim of this study is to analyse different practices of implementing the procedures of instructional system design in creating effective open and distance learning materials, Instructional system design consists of several sytmatc and systemaic phase wich are commonly used in designing and developing learning materials to facilitate students’ learning Reseach fellows of the Universitas Terbuka:*

Menyajikan dan mengupas salah satu model desain dan pengembangan sistem pembelajaran yang dapat digunakan untuk menciptakan kompetensi serta, memotivasi proses belajar peserta training, meningkatkan daya ingat atau retensi terhadap kompetensi yang dilatihkan dalam dunia kerja nyata. Sangat tepat untuk digunakan di Pusdiklat, pengelola program pelatihan (*Training manager*), *instructor*, pelatih, pengajar, dan pendidik untuk diaplikasikan dalam menciptakan program pelatihan yang berkualitas, sehingga dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang dilatihkan.

Adapun uraian diatas dapat meningkatkan hasil belajar dan pembelajaran, Selain meningkatkan kinerja SID dapat digunakan oleh perangkat desa untuk

mendukung pengambilan keputusan perangkat desa serta sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan desa. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh desa sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Pelatihan sebagai sebuah konsep program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang, agar berkembang sangat pesat dan modern. Perkembangan model pelatihan (*capacity building, empowering, training dll*) saat ini tidak hanya terjadi pada dunia usaha, akan tetapi pada lembaga-lembaga profesional tertentu model pelatihan berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan belajar, proses belajar (*proses edukatif*), *assesment*, sasaran, dan tantangan lainnya (dunia global dll).

Pengembangan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa yang telah disusun untuk mensikapi perlunya peningkatan dan perkembangan pemerintah desa beserta perangkatnya mengakui bahwa data merupakan bahan pokok bagi perencanaan program pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia ditingkat desa. Jika data lemah maka perencanaan tidak akan tepat. Sumber: Buku Kapasitas Aparatur Desa

L.A.N., (2009:139). Pelatihan (*training*) merupakan aktivitas formal dan informal yang mengacu kepada metode yang di gunakan untuk memberikan pelatihan aparatur yang baru atau yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, melalui proses yang terintegrasi agar para aparatur bekerja untuk mencapai tujuan organisasi

Penomena dan konsep pelatihan dan pengembangan, Pelatihan (*Training*) merupakan proses Pelatihan yang melibatkan berbagai keahlian, konsep,

pemahaman pengetahuan, peraturan, atau sikap dapat meningkatkan kinerja dan tenaga kerja.

Simamora.,(2016:273) mengatakan bahwa menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian.

Dalam pelatihan ini dibahas berbagai hal yang terkait kompetensi peningkatan tata kelola pemerintahan desa, seperti manajemen kepemimpinan pemerintahan desa, dan penyusunan sistem informasi desa. Dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat desa, perlu perubahan transformasi pelatihan keterampilan sistem nilai lama dan baru, antara nilai tradisional/konvensional dan modern. permasalahan memerlukan perhatian. Salah satu masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi aparatur desa, terbatasnya sumberdaya manusia, rendahnya kemampuan, keterampilan penggunaan komputer aparatur desa sangat terbatas, dan sarana pendukung kantor yang kurang lengkap.

Berdasarkan hasil pengamatan, pra penelitian pada bulan Juni tahun 2019 dan waktu observasi lapangan bahwa pelaksanaan administrasi desa di desa Kwala Begumit relative belum berjalan dengan tertib mengindikasikan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan harapan semua pihak.

Permasalahan umum yang terjadi dalam pencatatan data informasi desa, termasuk Desa Cikurai Selatan relative terbatasnya kapasitas sumberdaya aparatur desa dan perangkatnya, serta sumberdaya pendukung berupa perangkat lunak (*Software*) perangkat keras (*Hardware*). Upaya yang harus dilakukan

guna memecahkan permasalahan yang dihadapi saat ini pengolahan data informasi desa perlu dikembangkan dalam suatu

Analisis Kebutuhan Model Pelatihan berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pelatihan kapasitas aparatur desa yang berbasis Sistem Informasi Desa (SID), yang selama ini untuk pelatihan secara spesifik masih menggunakan pendekatan model klasikal tingkat desa sehingga fasilitator yang aktif yang menyampaikan secara konvensional/menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta pelatihan.

Untuk itu melakukan observasi apakah model pelatihan sistem informasi desa masih cocok atau relevan dengan kondisi belajar saat ini, maka dilakukan pengumpulan informasi kesesuaian model pelatihan sistem informasi desa untuk pelatihan kapasitas aparatur desa. Pengumpulan informasi awal ditujukan sebagai pijakan pengembangan model yang akan dikembangkan.

Pengumpulan informasi awal ini dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan pengamatan, wawancara dan penyebaran kusioner kepada aparatur desa dan fasilitator yang terlibat dalam pembelajaran pelatihan kapasitas aparatur desa. Responden yang dilibatkan dalam pengumpulan informasi ini adalah peserta dan fasilitator kapasitas aparatur desa yang terlibat pengumpulan informasi ini adalah peserta pelatihan. Dalam melaksanakan sistem informasi desa berbentuk of line dan on line yang didukung dengan manajemen modern secara bertahap memanfaatkan kemampuan komputer mengolah data, menyimpan, menyajikan data informasi tentang desa.

Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi aparatur pemerintah desa, apalagi dalam meningkatkan kapasitas (*Capacity Building*) aparatur desa untuk bekerja dan lebih menguasai keterampilan serta meningkatkan kinerja lebih terhadap hasil pekerjaan yang akan dijabat kedepan.

Penyebab lain yang ditemukan termasuk masalah kinerja bisa mendukung manajemen atau fungsi pemerintahan desa harus dikuasi oleh seorang aparatur pemerintah desa. Kata diklat terdiri dari pendidikan dan pelatihan yang mengandung unsur adanya proses belajar dan pembelajaran.

Edwin B. Lippo.,(2007:210) mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan Pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan kualitas kerja.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditentukan bahwa pengembangan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat adalah upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur desa dalam penelitian ini akan dilakukan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara efisien dan efektif.

Model pelatihan kapasitas aparatur desa menggunakan apa selama ini? Pelatihan aparatur desa selama ini menggunakan model deduktif artinya pelatihan secara langsung kepada peserta pelatihan dan sekaligus penyampaian materi masih kertas transparan memakai overhad, kertas plano di ikuti metode

ceramah dari fasilitator yang berjalan dengan satu arah dan cepat membosankan menjadikan peserta banyak yang mengantuk. Oleh sebab itu desa membutuhkan cara-cara yang sepenuhnya baru ,ini akan dikembangkan dengan sebuah system yang dinamai Sitim Imformasi Desa dan Kawasan (sistim informasi desa).

Peningkatan kapasitas aparatur desa ber basis aplikasi sistim informasi desa (SID) yang menggunakan model pengembangan produk Dick and Carey. Model pengembangan produk pelatihan ini merupakan model yang disusun secara terprogram dengan urutan yang sistematis dan memenuhi karakteristik peserta pelatihan dalam belajar.

Keberhasilan diklat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kualitas pendidik dan peserta, bahan, media, strategi dan kondisi pelatihan (Daryanto, 2014: 120). Penerapan model pelatihan sebagai bagian dari keterlaksanaan proses belajar mengajar, berkaitan erat dengan kualitas pengembangan model pembelajaran, artinya jika suatu desain model pelatihan dikembangkan secara baik dan melalui tahapan yang benar, berpeluang besar dapat dipergunakan secara maksimal.

Berdasarkan observasi di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat pada tanggal Pebruari - Maret 2020 , model pelatihan yang digunakan dalam pelaksanaan diklat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat ADDCIE adalah model enam langkah dengan sistem paket, dengan menentukan kompetensi pelatihan, jadwal dan jam pelatihan, serta metode konvensional atau ceramah. Hasil observasi dan evaluasi pada akhir pelatihan, model semacam ini mempunyai kelemahan antara lain: a) sebagian

peserta merasa tidak meningkat kemampuannya karena sebagian materi yang diberikan kurang sesuai dengan materi yang diharapkan, b) peserta tidak mempunyai motivasi yang tinggi untuk datang ditempat pelatihan karena menganggap hadirnya ke tempat pelatihan sebagai sarana *refresing* dari kejenuhan bekerja dan untuk menggugurkan kewajiban saja, c) disiplin peserta lemah karena tidak merasa terpacu untuk belajar sesuatu yang baru, d) sebelum waktu habis, peserta sudah merasa jenuh karena tidak ada tantangan secara individu, e) hasil diklat tidak diikuti dengan laporan (deskripsi) sehingga tidak bisa dijadikan bahan belajar pada waktu di lapangan.

Model pelatihan sistem konvensional bersifat *menggurui* (menganggap peserta diklat belum bisa apa-apa) dan mempersepsikan peserta mempunyai kemampuan yang sama. Model pelatihan ADDCIE seharusnya berbeda dengan model pelatihan yang diterapkan pada pelatihan manajemen atau pelatihan lainnya yang bersifat teori, karena pada pelatihan ADDCIE harus ada praktik langsung atau minimal menggunakan simulator yang mirip dengan yang ada dilapangan, sehingga hasil dari pelatihan langsung dapat diaplikasikan dengan realita di lapangan.

Berdasarkan permasalahan dan pertimbangan pemikiran diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan model pelatihan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat . Model yang akan dikembangkan adalah model pelatihan ADDCIE berbasis kompetensi, yaitu suatu model pelatihan yang menekankan pada proses dan hasil akhir dengan sistem belajar melalui berbuat.

Model pelatihan sistem konvensional bersifat *menggurui* (menggagap peserta diklat belum bisa apa-apa) dan mempersepsikan peserta mempunyai kemampuan yang sama. Model pelatihan ADDCIE seharusnya berbeda dengan model pelatihan yang diterapkan pada pelatihan manajemen atau pelatihan lainnya yang bersifat teori, karena pada pelatihan ADDCIE harus ada praktik langsung atau minimal menggunakan simulator yang mirip dengan yang ada dilapangan, sehingga hasil dari pelatihan langsung dapat diaplikasikan dengan realita di lapangan.

Keberhasilan diklat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kualitas pendidik dan peserta, bahan, media, strategi dan kondisi pelatihan Daryanto.,(2014: 120). Penerapan model pelatihan sebagai bagian dari keterlaksanaan proses belajar mengajar, berkaitan erat dengan kualitas pengembangan model pembelajaran, artinya jika suatu desain model pelatihan dikembangkan secara baik dan melalui tahapan yang benar, berpeluang besar dapat dipergunakan secara maksimal.

Model pelatihan sistem konvensional bersifat *menggurui* (menggagap peserta diklat belum bisa apa-apa) dan mempersepsikan peserta mempunyai kemampuan yang sama. Model pelatihan ADDCIE seharusnya berbeda dengan model pelatihan yang diterapkan pada pelatihan manajemen atau pelatihan lainnya yang bersifat teori, karena pada pelatihan ADDCIE harus ada praktik langsung atau minimal menggunakan simulator yang mirip dengan yang ada dilapangan, sehingga hasil dari pelatihan langsung dapat diaplikasikan dengan realita di lapangan.

Sistem Informasi Desa berkontribusi dalam proses integrasi dan sinergi sistem pendataan di desa. Semangat yang di usung sistem informasi desa adalah, Satu data “dalam satu aplikasi” .Survey dan Wawancara kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan pelatihan Pengembangan Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa, Analisis, Desain, Development, Conduct, Implementasi, Evaluasi) Berbasis Sistem Informasi Desa (SID) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat.

Yang berkaitan dengan pemakaian analisis data dan informasi terhadap based data di dalam komputer di ikuti Sistem Informasi Desa (SID) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. SID dapat menjadi instrument untuk memastikan kehadiran saluran komunikasi yang baik antara masyarakat, dan pemerintahan di atasnya.

Pelatihan ini dilatih oleh Tim pelatih di Sekretariat Dinas PMD Kabupaten Langkat. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat Desa, dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan terintegrasi melalui Sistem Informasi desa dan Kabupaten.

Adapun fungsi antara lain (a.) Sebagai media untuk mengelola data desa. (b). Media informasi dan komunikasi pemerintah desa. (c). Pelayanan administrasi dan pengelola keuangan desa.(d). Pengelola Informasi Sumber Daya dan Potensi desa. Adapun manfaat dari SID (Sistem Informasi Desa) antara lain:(1) Memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa.(2) Meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru. (3) Memperluas jangkauan informasi,(4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa.(5)Memperluas akses informasi tentang desa, (6)

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. (7) Menemukenali potensi sumberdaya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa.(8) Memudahkan desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga .(9) Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan (10) kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ketinggian desa. (11) Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan ,program dan kegiatan pembangunan desa. (12) yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. (13) Memudahkan pemerintah daerah melakukan pemantauan perkembangan desa secara nyata.

Karena kondisi model pelatihan selama ini bersifat konvensional, maka oleh peneliti melakukan terobosan terhadap system pelatihan dengan menggunakan model ADDCIE. Yang mana kegiatan tersebut merupakan model pelatihan yang dirancang oleh peneliti agar dapat meningkatkan kinerja aparatur desa dengan system pengolahan data dan kegiatan SID. Kegiatan SID ini merupakan inisiatif dan inovasi dari peneliti untuk meningkatkan keterampilan aparatur desa dan kesejahteraan rakyat desa. Mengingat belum optimalnya fungsi koordinasi, sinergitas dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan antar stake holder, salah satu faktor terbesar adalah tidak tersedianya data yang presisi dengan kondisi faktual dilapangan mengakibatkan bantuan yang dijalankan perangkat desa menentukan fokus, sasaran dan strategi implementasinya belum tepat sasaran.

Dengan demikian penelitian ingin mengembangkan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat, dimana kegiatan ini merupakan paket

pembelajaran dengan strategi pembelajaran dan pemograman materi pembelajaran yang layak digunakan di kelas dalam meningkatkan hasil belajar aparatur desa.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah sebagai berikut :

1. Pelatihan Desa bersifat konvensional dengan sistem ceramah ,modul ,tanya jawab menimbulkan kurang berhasilnya pelatihan yang tepat sasaran dan efektif.
2. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pelayanan sistem informasi desa serta administrasi desa.
3. Pengembangan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistem informasi desa di Kabupaten Langkat.
4. Pelatihan kapasitas manajemen kepemimpinan kepala desa dan aparatur desa.
5. Tangung jawab Kepala Desa yang baru menjabat menimbulkan tugas pelaporan terlambat.
6. Metode dan sistem pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa.
7. Kapasitas keterampilan kepala desa dan aparatur desa dalam menggunakan komputer.
8. Kemampuan SDM aparatur desa dan keterlambatan laporan LLPD.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah di atas, maka pembatasan masalah di fokuskan pada “ Pengembangan model pelatihan

kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat ”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka rumusan masalah pada penelitian pengembangan ini di ajukan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Model Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa Berbasis Sistim Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat valid untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa ?
2. Bagaimana Pengembangan Model Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa Berbasis Sistim Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat Efektif untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, Tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui Penerapan Pengembangan Model Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa Berbasis Sistim Informasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat untuk mendukung kinerja aparatur desa dan pelaporan tugas sebagai Kepala Desa di Kabupaten Langkat.
2. Mengetahui pengembangan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa mendukung manajemen efektif dalam kepemimpinan kepala desa di Kabupaten Langkat.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pembelajaran pelatihan pengembangan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistem informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat. Namun baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada pengembangan model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistem informasi desa. Oleh karena itu riset ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang model pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistem informasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peserta

Aparatur desa sebagai peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada aparatur desa dan, sebagai acuan model pelatihan kapasitas aparatur desa yang dapat digunakan dalam pembelajaran pelatihan yang penekanannya pada lulusan dalam menguasai keterampilan yang dimilikinya yang berorientasi pada model.

b. Bagi Fasilitator

Kepada fasilitator yang mengajar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelatihan dalam peningkatan yang telah dimiliki

peserta yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, dan manfaat Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat

c. Dinas dan Lembaga

Dinas Pengembangan Sumberdaya Manusia yang ada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi Sumatera Utara sehingga menjadi alternative pelatihan kapasitas aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

d. Departemen Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan. untuk menjadikan model tidak hanya pelatihan dan diklat aparatur desa tetapi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dukungan keberhasilan aparatur sipil negara yang berkecimpung dalam Selain itu manfaat penelitian pada pengelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat, sebagai referensi model addcie pelatihan kapasitas aparatur desa berbasis sistim informasi desa yang harus disosialisasikan.